



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI

UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

SUB UNIT KERJA : BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SHERLY OCTAVIANA SARI

2. Jabatan : ANALIS KERJASAMA LUAR NEGERI

3. NHK : **620651**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp	2.000.000.000
--------------------------	---------------

1. <mark>T</mark>anah dan <mark>B</mark>angunan S<mark>el</mark>uas 63 m<mark>2/1</mark>08 m2 di <mark>T</mark>ANGERAN<mark>G</mark>,

HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 380.000.000

 MOBIL, HONDA CITY Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000

2. MOBIL, HONDA BRIO RS Tahun 2019, HADIAH Rp. 185.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	145.586.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	KPK KILL
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	232.915.561
F. HARTA LAINNYA	Rp.	of other
Sub Total	Rp.	2.758.501.561
III. HUTANG	Rp.	al al
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.758.501.561

Catatan:

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.





- 3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 3 Agustus 2020.
- 4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

